

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial PKH di Tingkat Lokal (Studi Kasus Kecamatan Siulak Mukai Kab Kerinci)

¹ Dena Lebiska/

Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi

Email: denalebiska2312@gmail.com

History Artikel:

Received 1 April 2026

Revised 15 April 2026

Accepted 21 April 2026

Available Online 25 April 2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan bantuan sosial Program Keluarga Harapan di tingkat lokal. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan pihak terkait serta masyarakat penerima dan non penerima manfaat. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program secara umum telah mengacu pada ketentuan yang berlaku, namun masih terdapat beberapa hal yang belum berjalan secara optimal, khususnya pada aspek ketepatan sasaran, proses verifikasi data, dan pengawasan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kapasitas pelaksana, koordinasi antar pihak, serta dinamika sosial masyarakat.

Kata Kunci: pelaksanaan, kebijakan, PKH, bantuan sosial, evaluasi

Abstract

This study aims to evaluate the implementation of the Family Hope Program policy at the local level. The research employs a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving relevant stakeholders as well as beneficiary and non-beneficiary communities. Data analysis was conducted through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the program has generally been carried out in accordance with existing regulations, although several aspects have not yet been fully optimal, particularly in terms of targeting accuracy, data verification processes, and supervision. These conditions are influenced by implementer capacity, inter-institutional coordination, and local social dynamics.

Keywords: implementation, policy, social assistance, evaluation, poverty

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan di Indonesia. Berbagai kebijakan telah dirancang untuk mengurangi tingkat kemiskinan, salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bentuk bantuan sosial bersyarat. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks pelaksanaan di tingkat lokal, efektivitas suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kejelasan regulasi, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dalam praktik. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan antara ketentuan kebijakan dengan kondisi empiris di lapangan, yang dapat memengaruhi capaian program.

Teori Mazmanian dan Sabatier menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh kejelasan tujuan, kapasitas pelaksana, serta kondisi lingkungan sosial. Ketiga aspek tersebut menjadi penting untuk memahami bagaimana suatu kebijakan dijalankan dan sejauh mana tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada evaluasi pelaksanaan kebijakan PKH di tingkat lokal, dengan tujuan untuk memahami dinamika pelaksanaan serta faktor-faktor yang turut memengaruhinya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan kebijakan Program Keluarga Harapan serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi pihak pelaksana program dan masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan program. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan secara umum telah mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan. Proses penyaluran bantuan, pendampingan kepada penerima manfaat, serta mekanisme administrasi program telah berjalan sesuai dengan kerangka kebijakan yang berlaku. Namun demikian, dalam praktik pelaksanaannya di tingkat lokal, terdapat beberapa dinamika yang memengaruhi efektivitas program. Pada aspek penentuan sasaran, misalnya, masih ditemukan kondisi di mana data penerima manfaat belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sosial ekonomi terkini. Hal ini berkaitan dengan proses pemutakhiran data yang memerlukan waktu serta keterlibatan berbagai pihak. Pada aspek verifikasi dan validasi data, pelaksanaan di lapangan menunjukkan adanya variasi dalam proses pelaksanaan, baik dari segi intensitas maupun mekanisme yang digunakan. Dalam beberapa situasi, keterbatasan waktu dan sumber daya turut memengaruhi optimalisasi proses tersebut. Selanjutnya, pada aspek pengawasan, pelaksanaan program telah memiliki mekanisme pengendalian, namun dalam praktiknya masih terdapat ruang untuk penguatan, terutama dalam memastikan konsistensi pelaksanaan di berbagai tingkat. Pengawasan yang berjalan cenderung bersifat administratif, sementara pengawasan langsung di lapangan belum selalu dilakukan secara merata. Selain itu, dinamika dalam proses penyaluran bantuan juga menjadi bagian dari temuan penelitian. Meskipun secara umum penyaluran berjalan dengan baik, dalam beberapa kondisi terdapat penyesuaian waktu yang dipengaruhi oleh faktor teknis dan administratif.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan telah berjalan sesuai dengan kerangka kebijakan, namun dalam implementasinya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual yang berkembang di tingkat lokal.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan telah berjalan sesuai pedoman, namun belum sepenuhnya optimal pada beberapa aspek. Kondisi ini dapat dijelaskan melalui beberapa faktor yang saling berkaitan. Berdasarkan teori Mazmanian dan Sabatier, kejelasan tujuan kebijakan menjadi dasar dalam pelaksanaan program. Meskipun tujuan PKH telah dirumuskan dengan jelas, variasi pemahaman di tingkat pelaksana dapat memengaruhi konsistensi pelaksanaan di lapangan. Selanjutnya, pada aspek kapasitas pelaksana, keterbatasan sumber daya dan beban kerja berpengaruh terhadap proses pendataan, verifikasi, dan pengawasan, sehingga berdampak pada ketepatan sasaran program. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara kapasitas pelaksana dengan kualitas pelaksanaan kebijakan. Selain itu, kondisi sosial masyarakat turut memengaruhi dinamika pelaksanaan program. Interaksi sosial dan tingkat pemahaman masyarakat dapat berkontribusi terhadap variasi dalam penerimaan dan pelaksanaan program. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa keberhasilan program bantuan sosial dipengaruhi oleh kualitas data, koordinasi antar pihak, dan kapasitas pelaksana. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan merupakan hasil dari interaksi antara faktor regulasi, pelaksana, dan lingkungan sosial.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan di tingkat lokal secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun belum sepenuhnya optimal pada beberapa aspek, terutama terkait ketepatan sasaran, proses verifikasi data, dan pengawasan. Pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kejelasan tujuan kebijakan, kapasitas pelaksana, serta kondisi lingkungan sosial masyarakat. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan efektivitas pelaksanaan program. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian implementasi kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan program bantuan sosial di tingkat lokal.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa hal yang dapat menjadi perhatian dalam penguatan pelaksanaan program antara lain peningkatan kualitas pengelolaan data, penguatan koordinasi antar pihak terkait, serta peningkatan pemahaman pelaksana dan masyarakat terhadap program. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji pelaksanaan program bantuan sosial dengan pendekatan yang berbeda atau pada lokasi yang lebih luas, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Scott, Foresman and Company.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2018). *Pedoman Program Keluarga Harapan*.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023). *Petunjuk teknis pelaksanaan Program Keluarga Harapan*.

- Wahyuni, S. (2020). Evaluasi pelaksanaan program keluarga harapan dalam penanggulangan kemiskinan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(2), 120–130.
- Nurhayati, N., & Suhendra, A. (2022). Dampak program keluarga harapan terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 8(1), 45–55.
- Sari, D. P., & Rahman, F. (2021). Implementasi kebijakan bantuan sosial dalam perspektif kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 33–41.
- Putri, R., & Handayani, T. (2023). Ketepatan sasaran program bantuan sosial di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 10(2), 89–98.